KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Nasib RUU PPRT di DPR semakin tidak jelas
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

Nasib RUU PPRT di DPR semakin tidak Jelas

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh terkait kapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Saya belum bisa berkomentar lebih jauh. Nanti pada saat masuk masa sidang, baru kita akan membahas rancangan undang-undang ini," ujar wakil Ketua DPR RI kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

Secara teknis dan mekanisme legislasi, untuk bisa membawa RUU PPRT ke dalam Rapat Paripurna dan disahkan, RUU tersebut harus dibahas terlebih dahulu pada tingkat rapat Bamus. Namun, hingga delapan bulan berlalu, proses legislasi RUU PPRT belum pernah dibawa dalam pembahasan rapat bersama dan masih tertahan di meja Ketua DPR Puan Maharani.

Harapan masyarakat terkait adanya pembahasan RUU PPRT sempat muncul pada saat Rapat Paripurna DPR pada 21 Maret 2023 yang dipimpin Puan Maharani. Pada kesempatan tersebut, Puan menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun, hal tersebut ternyata berlalu begitu saja.

Jika melihat target pemerintah, seharusnya pascadiserahkannya DIM RUU PPRT ke DPR, pembahasan RUU tersebut berlanjut. Apalagi, saat penyerahan DIM tersebut DPR baru membuka masa persidangan.

Dengan melihat suasana perpolitikan nasional saat ini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT Lita Anggraini mengatakan tersanderanya RUU PPRT selama bertahun-tahun di meja Ketua DPR menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan dan empati kepada pekerja rumah tangga.

"Proses RUU yang lain seperti Cipta Kerja dibahas begitu cepat, sedangkan untuk RUU PPRT masih terus disandera. Padahal, proses masuknya kedua RUU dalam prolegnas hampir bersamaan. Selain itu, isi dari RUU PPRT juga tak sebanyak RUU Ciptaker. Artinya, tidak ada keberpihakan DPR terhadap PRT yang selama ini telah menopang ekonomi nasional," ujarnya.

Menurut Lita, pengesahan RUU PPRT sangat urgen untuk melindungi para pekerja di ranah domestik yang didominasi kelompok perempuan. Jika RUU PPRT disahkan, pembangunan akan inklusi. Dampak lain, ucap Lita, jumlah angkatan tenaga kerja perempuan juga akan naik signifikan karena lebih dari lima juta perempuan diakui sebagai tenaga kerja. (Dev/H-1)